

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sekilas Tentang PT. Jasa Raharja (Persero)

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang memberikan jasa perlindungan untuk masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan, baik individu maupun kegiatan usaha. Dengan demikian, perusahaan asuransi ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal perlindungan terhadap ketidakpastian pendapatan usaha dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan negara berupa penerimaan dari premi yang dihimpun oleh perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh besarnya pangsa pasar yang potensial dan perangkat regulasi pemerintah terhadap industri asuransi.

Pembentukan PT. Jasa Raharja (Jasa Raharja) diawali oleh langkah pemerintah pada tahun 1960 untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN). Jasa Raharja merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa peransuransian sosial, sebagai pelaksana Undang-Undang No.33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No.34 Tahun 1964 yang sifatnya wajib. Sesuai Undang-Undang No.33, perusahaan melakukan penghimpunan premi berupa Iuran Wajib (IW) yang berasal dari seluruh penumpang transportasi publik. Sesuai Undang-Undang No.34, Perusahaan menghimpun premi dalam bentuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari seluruh pemilik kendaraan bermotor. Dana tersebut dikelola dan digunakan untuk menyantuni para korban kecelakaan dan ahli waris akibat kecelakaan lalu lintas.

Dalam proses bisnisnya, Jasa Raharja menyadari berbagai risiko melekat pada Perusahaan. Fenomena kebangkrutan beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat menyebabkan krisis pada tahun 1998, mengungkap fakta bahwa terdapat kegagalan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyadari bahwa setiap BUMN membutuhkan suatu sistem yang dapat melindungi nilai BUMN, karena BUMN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian BUMN melahirkan KEPMEN No.117/M-MBU/2002 yang mengharuskan setiap BUMN menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam pelaksanaan GCG, Jasa Raharja selalu mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Menurut www.jasaraharja.co.id, pada tahun 2008, Jasa Raharja mendapatkan skor *assessment* GCG 86,20%, pada tahun 2009 naik menjadi 86,22%, lalu naik secara signifikan pada tahun 2010 sebesar 94,32%, pada tahun 2011 naik menjadi 94,62%, kenaikan skor *assessment* GCG

tidak diikuti pada tahun 2012 karena skor turun menjadi 92,38%. Menurut www.bumn.go.id, Jasa Raharja beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai BUMN terbaik di bidang asuransi, antara lain pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006, dan berturut-turut pada tahun 2010 hingga 2013.

Jasa Raharja melindungi nilai perusahaan secara konsisten dengan menerapkan Manajemen Risiko. Hal tersebut secara nyata dilakukan oleh Jasa Raharja dengan menambahkan Direktorat Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi pada struktur organisasi Perusahaan tahun 2013 lalu. Melalui pelaksanaan Manajemen Risiko, Jasa Raharja bertujuan untuk melindungi manajemen agar tidak menghasilkan kebijakan yang merugikan dimasa mendatang. Jasa Raharja mengadopsi *framework* ISO 31000 dan menyesuaikan sistem tersebut dengan keadaan Perusahaan untuk menerapkan sistem Manajemen Risiko yang baik.

Sistem Manajemen Risiko selalu dikembangkan secara terintegrasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko serta memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sistem Manajemen Risiko yang dikembangkan meliputi prosedur yang mendukung dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan dapat terkendali dalam batas yang dapat diterima serta menguntungkan bagi Perusahaan. Pengembangan sistem Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ISO 31000:2009.

1.1.2 Logo Perusahaan



GAMBAR 1.1

Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber: www.jasaraharja.co.id

1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

“Menjadi Perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat”

b. Misi

Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja:

- 1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
- 4) Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

1.2 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa Perusahaan, manajemen dan pengelolaan Perusahaan dipisahkan dari kepemilikan Perusahaan, agar pemilik Perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya efisien dan dikelola oleh para profesional. Menurut Sutedi (2011:14), pemisahan seperti ini memungkinkan pengelola manajemen leluasa untuk memaksimalkan laba Perusahaan yang akan memaksimalkan kepentingan pengelola dengan beban yang ditanggung para pemilik Perusahaan. Pemisahan tersebut menimbulkan celah bagi manajemen dalam penggunaan dana milik Perusahaan dan menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan-kepentingan di dalam Perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan untuk dapat memonitor masalah yang timbul di antara pengelola manajemen dengan pemegang saham.

Tahun 1997 dan 1998 merupakan kondisi buruk di dunia bisnis Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1998 disebabkan oleh *Corporate Governance* yang buruk di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut Zarkasyi (2008:8), secara umum hasil survei Booz-Allen dan Hamilton tahun 1998 menyatakan bahwa pelaksanaan GCG pada perusahaan di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur (2,88) dibandingkan dengan Malaysia (7,72), Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan Jepang (9,17). *Asian Development Bank* (ADB) mengemukakan fenomena yang sering dijumpai pada perusahaan di Indonesia adalah belum melakukan pengelolaan Perusahaan secara profesional. Perusahaan harus memastikan bahwa bisnis dilaksanakan secara maksimal dan dikelola secara efektif dengan risiko yang dinilai dan dikendalikan secara benar (Lipworth, 1997:24).

Corporate Governance yang buruk merupakan sumber dari kemunculan risiko Perusahaan. *Corporate Governance* yang baik diyakini akan memberikan manfaat lebih bagi Perusahaan, manajemen, pekerja, dan pihak lain yang terkait (Elias, 2004:55). Kehadiran *Good Corporate Governance* merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif dan

menghindari terjadinya skandal di dalam Perusahaan (Santoso, 2008:183). *Good Corporate Governance* menuntut manajemen untuk mengelola risiko secara profesional (Tjahjadi, 2010:142).

Menurut Tjahjadi (2011:146), Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Terdapat dua *framework* yang membantu Perusahaan untuk melaksanakan Manajemen Risiko, *Enterprise Risk Management* (ERM) oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dan Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000:2009. Menurut Demidenko dan McNutt (2010:810), dua *framework* tersebut berfokus pada *good governance*, meningkatkan pengambilan keputusan dan memilih alternatif untuk membantu mengurangi kerugian. ERM hanya berfokus terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk melihat keefektifan penerapan ERM (Demidenko dan McNutt, 2010:805). ERM tidak memiliki konteks eksternal sehingga terkesan risiko yang muncul tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, berbeda dengan Manajemen Risiko yang memiliki konteks eksternal. Sehingga ISO 31000:2009 dapat mendorong Perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif, memfasilitasi tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan menyeimbangkan biaya untuk menghindari ancaman dan meraih peluang dan manfaat yang diperoleh dari penerapan Manajemen Risiko.

Perusahaan yang mengenali dan mengatasi risiko, akan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang (Lipworth, 1997:24). Demidenko dan McNutt (2010:803) mengatakan bahwa Manajemen Risiko merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan Perusahaan dan memantau kinerja dari manajemen. Manajemen Risiko diterapkan karena akan menghasilkan lebih banyak informasi mengenai risiko organisasi, dan menghasilkan manajemen yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik (Kleffner, Lee, dan McGannon, 2003:56). Pelaksanaan Manajemen Risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan *Good Corporate Governance* melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi (Elias, 2004:55).

Blanchard (2003:5) mengatakan bahwa perlu mengadopsi suatu *framework* Manajemen Risiko untuk mencapai tujuan *governance*, dan memenuhi kewajiban untuk bertindak sesuai aturan *framework* yang diadopsi. Manajemen Risiko memonitor pencapaian tujuan utama dengan cara yang etis untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan *stakeholders* (Demidenko dan McNutt, 2010:812). Saat penerapan Manajemen Risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrol risiko pada *core competence* dan *competitive advantage*, maka hubungan antara Manajemen Risiko dan GCG akan semakin akut (Drew dan Kendrick, 2005:33).

Berdasarkan beberapa survei, sejumlah kasus yang menyebabkan krisis ekonomi di dunia disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan *Corporate Governance*. Enron, WorldCom, Healthsouth, dan Tyco merupakan perusahaan besar yang mengalami kegagalan mengelola Perusahaan. Skandal pada tabel di bawah ini terjadi karena lemahnya penerapan Manajemen Risiko

dalam mendukung terwujudnya *Corporate Governance* yang baik pada perusahaan-perusahaan tersebut.

TABEL 1.1
Corporate Scandal

No	Nama Perusahaan	Skandal
1.	Enron	Penyelewengan para pimpinan Perusahaan dan menyeret Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson. Saham Enron pada Agustus 2000 masih berada pada US\$ 90/lembar turun drastis hingga US\$ 45 sen per lembar.
2.	WorldCom	Direksi WorldCom menggunakan metode akuntansi palsu untuk menaikkan harga saham Perusahaan. Aset Perusahaan yang terdapat pada rekening Perusahaan dimanipulasi hingga US\$ 11M.
3.	HealthSouth	Richard Scrushy, <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) HealthSouth, melakukan transaksi fiktif dan membuat rekening fiktif, menggelapkan US\$ 1,4M, yang dilaporkan sebagai pendapatan tahun 1996 sampai 2003.
4.	Tyco	<i>Chief Executive Officer</i> (CEO) dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Tyco menggelapkan uang perusahaan sebanyak US\$ 600 Juta.

Sumber: list25.com

Saat ini, Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* merupakan satu perangkat yang hangat diterapkan di dunia, begitu juga di Indonesia, untuk mencegah dampak dari penerapan *Corporate Governance* yang buruk Di Indonesia, BUMN berkontribusi terhadap kinerja perekonomian nasional secara signifikan, maka BUMN perlu dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* demi mewujudkan *Good Corporate Governance*. Kementerian BUMN, menerbitkan Keputusan Menteri No. KEP-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, untuk memaksimalkan nilai dan menjadikan BUMN menjadi Perusahaan kelas dunia.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang memberikan jasa perlindungan untuk masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan, baik individu maupun kegiatan usaha. Dengan demikian, perusahaan asuransi ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal perlindungan terhadap ketidakpastian pendapatan usaha dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan negara berupa penerimaan dari premi yang dihimpun oleh perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh besarnya pangsa pasar yang potensial dan perangkat regulasi pemerintah terhadap industri asuransi.

Jasa Raharja merupakan BUMN di bidang asuransi yang menghimpun premi dari para pemilik kendaraan bermotor dan pengguna transportasi umum. Dalam pelaksanaan GCG, Jasa

Raharja selalu mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Menurut www.jasaraharja.co.id, pada tahun 2008, Jasa Raharja mendapatkan skor *assessment* GCG 86,20%, pada tahun 2009 naik menjadi 86,22%, lalu naik secara signifikan pada tahun 2010 sebesar 94,32%, pada tahun 2011 naik menjadi 94,62%, kenaikan skor *assessment* GCG tidak diikuti pada tahun 2012 karena skor turun menjadi 92,38%. Menurut www.bumn.go.id, Jasa Raharja beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai BUMN terbaik di bidang asuransi, antara lain pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006, dan berturut-turut pada tahun 2010 hingga 2013.

Menyadari pentingnya peran Manajemen Risiko sebagai salah satu pilar dari perwujudan *Good Corporate Governance*, pada tahun 2009, Jasa Raharja bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perusahaan (BPKP) untuk membangun sistem Manajemen Risiko. Jasa Raharja mengadopsi *framework* Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000:2009. Keputusan Menteri No. 168 Tahun 2010 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, pada pasal 3 mengatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan untuk memastikan bahwa Perusahaan Perasuaransian menerapkan Manajemen Risiko yang baik, mendorong Jasa Raharja untuk meningkatkan peran dan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Jasa Raharja untuk mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* yang diukur melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* (Studi pada Jasa Raharja 2014)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka identifikasi permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko di Jasa Raharja?
2. Bagaimana perwujudan *Good Corporate Governance* di Jasa Raharja?
3. Bagaimana pengaruh dari penerapan Manajemen Risiko terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* di Jasa Raharja?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan mengenai penerapan Manajemen Risiko dan Perwujudan *Good Corporate Governance*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Manajemen Risiko di Jasa Raharja.
2. Untuk mengetahui perwujudan *Good Corporate Governance* di Jasa Raharja.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Manajemen Risiko terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* di Jasa Raharja.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya sehingga berguna untuk pengembangan ilmu.

2. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perusahaan untuk menyusun strategi perusahaan di masa mendatang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Jasa Raharja dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum mengenai objek studi penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakanya penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan dengan jelas mengenai hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini meliputi uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pengolahan data beserta pembahasannya, yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan lingkup penelitian serta konsisten dengan tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan.